

## BAB 3

### SITUASI DAN KONDISI DI SEMENANJUNG KOREA SEBELUM DAN SESUDAH KTT INTER-KOREA

#### 3.1 Inisiatif Penyelenggaraan KTT Inter-Korea

Inisiatif penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ini pada dasarnya muncul ketika kedua negara bersaudara ini membutuhkan momentum untuk meredakan perselisihan diantara keduanya. Dalam perspektif Korea Utara, penyelesaian masalah yang berkepanjangan mereka dengan Korea Selatan dilatar belakangi oleh keinginan Korea Utara untuk mengurangi permasalahan dalam negeri mereka yang terus mengancam kelangsungan hidup rakyat mereka pada akhir abad ke-20. Masalah *famine* atau bencana kelaparan merubah kebijakan luar negeri Korea Utara dengan idealisme yang tetap mempertahankan *national identity* mereka. Dalam hal ini, Korea Utara mengambil kebijakan bahwa dengan bantuan asinglah, bencana kelaparan yang sedang mereka alami dapat teratasi. Sebagai fokus utama adalah mencoba menormalisasi hubungan mereka dengan Amerika Serikat yang dikenal sebagai aktor yang berpengaruh dalam peta geopolitik serta kekuatan ekonomi di dunia internasional.

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat-Tinggi (*Summit*) Inter-Korea Utara dan Korea Selatan di ibukota Korea Utara, Pyongyang. Pada awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 12-14 Juni 2000, namun atas usul Korea Utara maka KTT berhasil diselenggarakan pada tanggal 13-15 Juni 2000. KTT ini merupakan sejarah penting dalam hubungan antara kedua negara yang bermusuhan sejak lebih kurang selama 50 tahun. Dengan adanya kesepakatan kedua Korea untuk mengadakan pertemuan ini, merupakan suatu perubahan dan kecenderungan baru di Korea Utara untuk membuka diri terhadap dunia internasional dan melepaskan diri dari politik isolasinya selama ini, tanpa melepaskan identitas mereka sebagai salah satu negara komunis yang masih tegak berdiri. Kecenderungan ini nampak pula dari indikasi yang antara lain adanya kesediaan diri Korea Utara untuk menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara sejak awal tahun 2000, seperti negara-negara di ASEAN, Australia dan negara-negara di Eropa. Walaupun yang terutama adalah kesediaan diri Korea Utara untuk membuka diri

terhadap saudaranya yang selama ini menjadi lawan dalam pertikaianya dan menyambut tawaran pemerintah Korea Selatan untuk mengadakan *Summit* antara kedua negara (Korea Utara-Korea Selatan) pada tanggal 13-15 Juni 2000.<sup>124</sup>

Sebagai pertemuan pertama kali yang terjadi antara pemimpin tertinggi kedua negara sejak pecahnya semenanjung Korea pada perang tahun 1950-1953, maka pertemuan ini dapat dikatakan sebagai pertemuan bersejarah yang tak diduga sebelumnya dapat terlaksana. Namun demikian, antara pemerintah dan rakyat Korea Utara nampak menunjukkan rasa persahabatan dan sambutan yang meriah dengan menyambut kedatangan Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung ke Pyongyang untuk berkomitmen terhadap penyelenggaraan KTT Inter-Korea tersebut.<sup>125</sup>

Tanggal 13 Juni 2000, pukul 10.30 waktu Korea Utara, pesawat Presiden Kim Dae-jung bersama anggota delegasinya, antara lain istrinya, Menteri Unifikasi, Pak Jae-gyu, Menteri Keuangan dan Ekonomi Ri Han-jae, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Pak Ji-won dan Assisten Khusus Kim Dae-jung, Rim Tong-won berhasil mendarat di bandara Sun'an Pyongyang dan disambut langsung oleh pemimpin besar Korea Utara, Kim Jong-il di depan tangga pesawat. Dalam pertemuan kedua pemimpin ini tidak nampak suasana negara yang sedang berkonflik, bahkan Marsekal Kim Jong-il justru memperlihatkan sikap yang sangat *welcome* dan penuh senyum kepada Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung. Dengan rasa percaya diri Kim Jong-il mengarahkan Presiden Kim Dae-jung untuk memeriksa barisan kehormatan diatas karpet merah. Kemudian Kim Jong-il memperkenalkan Presidium *Supreme People Assembly* (SPA) Kim Yong-nam, Wakil Ketua Pertama Komisi Pertahanan Nasional Jo Myong-rok, Direktur Jenderal Departemen Politik Tentara Rakyat Korea (TRK), Chae Thae-bok, Ketua SPA, Kim Kuk-thae, Sekretaris Partai Pekerja Korea, Kim Yong-sun, Sekretaris Presidium SPA Kim Yong-dae dan para anggota kabinet, anggota parlemen serta pejabat tinggi lainnya. Turut dipersiapkan pula barisan wanita dan pria yang berpakaian tradisional Korea menyambut delegasi Korea Selatan dengan ayunan

---

<sup>124</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2000: Jilid II (Periode April-Desember 2000)*, *op.cit*, h. 14-15.

<sup>125</sup> *Ibid.*, h. 15.

bunga dan mengelu-elukan kedua pemimpin. Suasana penyambutan yang sangat meriah dan penuh haru tersebut tidak saja terlihat di bandara, namun juga disepanjang jalan yang dilalui Presiden Kim Dae-jung yang didampingi Kim Jong-il dalam mobil yang sama dan menuju tempat penginapan para tamu tertinggi negara, yaitu wisma tamu negara, Pyongyang, delegasi Korea Selatan disambut dan dielu-elukan oleh sekitar 600.000 masyarakat kota Pyongyang yang secara khusus dipersiapkan dalam penyambutan kedatangan delegasi Korea Selatan. Penjagaan ketat juga terlihat dengan adanya 2 orang polisi di tiap jarak 100 meter sepanjang jalan di bandara Sun'an menuju kota Pyongyang. Bahkan bagi rakyat Korea Utara yang tinggal disepanjang jalan itu tidak diperkenankan untuk keluar rumahnya masing-masing. Dari situasi dan kondisi tersebut sangat terlihat betapa besarnya harapan rakyat Korea akan keberhasilan KTT ini di masa mendatang. Jamuan makan dan berbagai kegiatan dalam kunjungan presiden Korea Selatan merupakan kesempatan penting sebagai momentum reunifikasi dan kemakmuran bangsa Korea yang dinantikan oleh 70.000.000 rakyat di semenanjung Korea yang sudah terpisah dan menginginkan reunifikasi untuk diwujudkan. Sementara itu dalam pidato balasannya, Presiden Kim Dae-jung menyampaikan pengharapan yang tulus atas sambutan hangat yang diberikan oleh Kim Jong-il dan seluruh warga Korea Utara. Melalui kunjungan dan rencana pertemuannya dengan Kim Jong-il dan seluruh warga Korea Utara. Melalui kunjungan dan rencana pertemuannya dengan Kim Jong-il, ia berharap bahwa masa depan bangsa Korea dapat diciptakan oleh bangsa Korea sendiri dan kunjungan ini menjadi awal baru bagi era penghapusan segala konfrontasi dan ketidakpercayaan serta mulai membangun rekonsiliasi dan kerjasama.<sup>126</sup>

Pada tanggal 14 Juni bertempat di gedung *Mansudae Hall* (Gedung Parlemen Korea Utara) telah berlangsung pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Kim Dae-jung dan delegasi dengan Presidium SPA Kim Yong-nam yang didampingi para pejabat tinggi Korea Utara. Pada pertemuan tersebut Kim Yong-nam menyatakan bahwa bagi Korea Utara reunifikasi nasional merupakan cita-cita lama yang diwariskan oleh mantan Presiden Kim Il-sung yang kemudian

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, h. 15-17.

diteruskan oleh Presiden Kim Jong-il hendaknya dicapai melalui tiga pokok reunifikasi, yakni tiga prinsip reunifikasi nasional (independensi, reunifikasi secara damai dan penyatuan seluruh bangsa Korea, sepuluh butir program penyatuan menyeluruh bangsa Korea, dan usulan pembentukan sebuah negara "Republik Konfederasi Demokrasi Koryo". Selanjutnya Kim Yong-nam menyebutkan bahwa satu hal yang terpenting dalam mewujudkan reunifikasi nasional adalah meletakkan tanggung jawab sepenuhnya pada kemandirian (tanpa campur tangan pihak lain) dan keberhasilan pembicaraan dalam KTT, dapat dilihat oleh semua pihak di dalam dan luar negeri bahwa bangsa Korea mampu menyelesaikan masalah reunifikasinya sendiri. Kemudian Kim Yong-nam menyatakan pula hendaknya kedua belah pihak dalam mengusahakan reunifikasi ini tidak saling berkonfrontasi, tetapi sebagai suatu bangsa walaupun berbeda dalam ideologi dan sistem sosialnya. Presiden Kim Dae-jung juga dalam tanggapannya menyatakan rasa terima kasih yang tulus kepada Presiden Kim Jong-il dan semua warga Pyongyang yang telah menyambut delegasi Korea Selatan dengan hangat, dan tidak ia duga sebelumnya bahwa Presiden Kim Jong-il akan menyambutnya langsung di bandara Sun'an dan masyarakat Pyongyang menyambut demikian hangat yang menunjukkan keinginan yang kuat kedua belah pihak untuk mewujudkan reunifikasi dan sekaligus memperlihatkan bahwa kedua negara adalah satu bangsa. Kim Dae-jung selanjutnya menyatakan bahwa apabila Korea Utara dan Korea Selatan menggabungkan kekuatannya bersama-sama dalam era milenium baru, maka Korea akan menjadi satu negara yang diperhitungkan di dunia dan tidak akan tertinggal di belakang negara lainnya, terutama di Asia.<sup>127</sup>

Tanggal 15 Juni merupakan akhir dari KTT Inter-Korea yang menghasilkan "Deklarasi Bersama" diantara kedua Korea. Presiden Kim Dae-jung dan rombongannya berangkat meninggalkan Pyongyang dan kembali menuju Seoul. Sebagaimana sewaktu tiba, pada saat kepulangannya ke Seoul pun dari tempat penginapan sudah dieluk-elukan oleh sekitar 500.000 masyarakat Pyongyang dan demikian pula di bandara Sun'an, Pyongyang, Presiden Kim Dae-

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, h. 17.

jung dilepas dengan upacara yang meriah. Presiden Kim Jong-il sendiri melepas hingga ke tangga pesawat Sebelum naik pesawat, Presiden Kim Dae-jung bersalaman dan berpelukan dengan Presiden Kim Jong-il, dan Kim Jong-il sendiri menyatakan kepuasannya atas keberhasilan KTT ini sebagai permulaan yang baik menuju reunifikasi kedua Korea. Demikian juga, Kim Dae-jung menyatakan rasa puasnya atas penyambutan dan penyelenggaraan serta hasil KTT yang dicapai.<sup>128</sup>

### 3.2 Faktor-faktor Pendukung Penyelenggaraan KTT Inter-Korea

Terdapat beberapa faktor pendukung penyelenggaraan KTT Inter-Korea tahun 2000, salah satunya adalah pertemuan antar pejabat-pejabat eksekutif KEDO<sup>129</sup> dengan Korea Utara yang diadakan pada tanggal 29 Februari 2000 di Pyongyang telah menghasilkan persetujuan pembukaan jalur perjalanan ferry langsung antara pelabuhan *Sokcho*, Korea Selatan dan *Yanghwo*, Korea Utara. Pembukaan jalur perjalanan ferry langsung ini merupakan sebagai pintu gerbang bagi pengiriman peralatan dan bahan-bahan untuk membangun dua proyek LWR<sup>130</sup> Korea Utara. Dengan disetujuinya pembukaan jalur perjalanan ferry ini, maka akan dapat mengurangi waktu perjalanan 5 jam dan pada dibuka pada tahun tersebut. Selain itu, persetujuan ini juga merupakan implementasi dari terbukanya kembali jalur-jalur transportasi dari wilayah Korea Selatan ke Korea Utara yang sempat tertutup bagi keduanya.<sup>131</sup>

Pada tanggal 14 Agustus 1999, Parlemen meratifikasi perjanjian pemerintah Korea Selatan untuk memberikan pinjaman dana sebesar US\$ 3,22 miliar kepada KEDO guna membiayai 2 proyek LWR Korea Utara dari biaya keseluruhan sebesar US\$ 4,6 miliar. Menurut perjanjian tersebut, Korea Utara akan mengembalikan pinjaman secara angsuran kepada KEDO selama 20 tahun setelah perpanjangan selama 3 tahun dan apabila Korea Utara gagal mengembalikan pinjaman tersebut, maka KEDO akan mengambil alih

<sup>128</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>129</sup> *Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO)*, sebuah konsorsium yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang untuk melaksanakan isi *Agreement Framework 1994* yang terkait dengan pengadaan energi air ringan bagi kebutuhan energi Korea Utara. Lihat Larry A. Niksch, *op.cit.* hal. 11.

<sup>130</sup> *Light Water Reactor (LWR)*. Proyek pengadaan energi air ringan bagi kebutuhan energi Korea Utara dan merupakan implemetasi dari *Agreement Framework 1994* antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. *Ibid.*

<sup>131</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 9-10.

tanggungjawabnya. Selain itu Parlemen Jepang juga telah meratifikasi perjanjian pemerintah Jepang untuk memberikan pinjaman dana kepada KEDO sebesar US\$ 1 miliar.<sup>132</sup>

Pada tanggal 15 Desember 1999, KEPCO telah menandatangani kontrak dengan KEDO untuk membangun reaktor nuklir air ringan (LWR) Korea Utara. Penandatanganan kontrak LWR senilai US\$ 4,6 miliar diadakan di Seoul antara Direktur Eksekutif KEDO Desaix Anderson dan dihadiri oleh 12 Dubes dari negara-negara anggota KEDO. Pejabat KEPCO mengatakan bahwa pekerjaan persiapan untuk pembangunan dua LWR di Komho, Hamgyong-do, Korea Utara sedang dikerjakan sejak bulan Agustus 1997 dan dengan ditandatanganinya kontrak tersebut merupakan tanda-tanda resmi dilakukannya pekerjaan konstruksi KEPCO. Pada kesempatan upacara penandatanganan tersebut, Direktur Eksekutif KEDO Anderson mengatakan KEPCO telah melengkapi semua kewajibannya dalam pekerjaan persiapan untuk membangun dua LWR dan tidak meragukan lagi bahwa KEDO akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan hasil baik. KEPCO telah menjadi kontraktor utama dalam konstruksi pembangunan dua LWR yang berkekuatan 1000-2000 megawatt sesuai kontrak dengan konsorium yang diketuai AS dan berharap akan menjadi katalisator utama dalam perbaikan hubungan antara Korsel dan Korea Utara. Walaupun pemerintah Korea Utara juga pada saat itu menyatakan kekhawatirannya akan keterlambatan penyelesaian proyek tersebut, namun proyek tersebut membuka jalannya proses dialog dan hubungan yang cukup diantara Korea Utara dan Korea Selatan.<sup>133</sup>

Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara merupakan inti diplomasi Seoul dalam abad ke-21. Kebijakan yang dinamakan *Sunshine Policy* dan bertujuan membujuk Korea Utara untuk dapat merubah sikapnya yang konfrontatif. Pemerintah Korea Selatan yang dipimpin Presiden Kim Dae-jung terus mendorong *Sunshine Policy* untuk dapat memajukan kerjasama dan rekonsiliasi antar kedua Korea guna menuju kearah perdamaian dan reunifikasi. Seperti yang tertuang dalam Deklarasi Berlin di bulan Maret 2000, pemerintah Korea Selatan tetap membantu Korea Utara menanggulangi bahaya kelaparan dan

---

<sup>132</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 54.

<sup>133</sup> *Ibid.*

krisis ekonominya, meskipun mendapat tekanan oleh provokasi Korea Utara. Saat itu pemerintah Korea Selatan lebih berupaya untuk mengakhiri konfrontasi Perang Dingin di semenanjung Korea dan memantapkan perdamaian. Upaya-upaya dalam mewujudkan hal-hal tersebut, dilakukan dalam implementasi *Sunshine Policy* yang berupa diplomasi aktif dan penggunaan kekuatan ekonomi Korea Selatan. Diplomasi yang dilakukan Korea Selatan secara komprehensif mendapatkan dukungan dari negara-negara sahabatnya. Dukungan tersebut muncul, karena Korea Selatan dianggap cukup berhasil dalam mengubah sikap Korea Utara sehingga mau menerima tawaran pemerintah Korea Selatan untuk mengadakan dialog tingkat tinggi diantara kedua negara.<sup>134</sup> Kebijakan *Sunshine Policy* ini ditujukan untuk mewujudkan sebuah paradigma baru dalam hubungan antara kedua Korea, yaitu atas dasar saling mengakui masa depan rakyat Korea, kerjasama lebih baik daripada konflik, dan damai lebih baik daripada perang. *Sunshine Policy* diharapkan akan membuat adanya kontak hubungan antara rakyat kedua Korea menuju hubungan yang stabil dan mengurangi resiko konflik. Kebijakan ini dijadikan inti diplomasi Seoul dalam abad milenium baru, yang diprioritaskan untuk memperbaiki hubungannya dengan Pyongyang melalui bantuan pembangunan ekonomi dan usaha mengajak Korea Utara menjadi bagian dari komunitas internasional serta mewujudkan hidup berdampingan secara damai diantara kedua Korea. Sejak Presiden Kim Dae-jung dilantik, pemerintah Korea Selatan telah memajukan kebijakan *Sunshine Policy*-nya terhadap Korea Utara dengan tujuan :

- a. Menghilangkan struktur perang dingin di semenanjung Korea dan memajukan kerjasama serta rekonsiliasi antara kedua Korea.
- b. Pemerintah Korea Selatan terus mendorong *Sunshine Policy*-nya dengan asumsi bahwa Korea Utara tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengubah sikapnya yang konfrontatif dan menerima usulan perdamaian yang ditawarkan Korea Selatan.

---

<sup>134</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 6.

- c. Meminta Korea Utara agar tidak melakukan agresi militernya ke Korea Selatan dan apabila terjadi perang di semenanjung Korea, maka hal tersebut merupakan tindakan kejahatan yang tidak dapat diampuni.<sup>135</sup>

Menteri luar negeri dan perdagangan Korea Selatan Hong Soon-young dalam pesannya pada peringatan HUT PBB ke-55 meminta Korea Utara agar menanggalkan kebijakan militernya dan mencurahkan perhatiannya terhadap sektor pertanian yang produktif. Korea Selatan siap memberikan bantuan kepada Korea Utara, jika Korea Utara mau mengubah sikap dan menyangkal tuduhan yang menurut Korea Selatan tidak mempunyai niat baik. Dalam hal ini Korea Utara menuduh bahwa *Sunshine Policy* yang diterapkan oleh Korea Selatan mempunyai tujuan untuk meningkatkan antagonisme, konfrontasi dan juga untuk menguasai Korea Utara. Oleh karena itu, menteri luar negeri dan perdagangan Korea Selatan menegaskan bahwa *Sunshine Policy* bertujuan untuk membantu pembangunan ekonomi Korea Utara dan membantu Korea Utara untuk menjadi komunitas internasional serta membangun hidup berdampingan secara damai antara kedua Korea. Begitu pula dengan sikap yang dikemukakan Perdana Menteri Korea Selatan Kim Jong-pil dalam pesannya pada hari kebangkitan nasional tanggal 3 Oktober 1999 yang meminta Korea Utara dapat melaksanakan perjanjian dasar Korea Selatan-Korea Utara yang telah ditandatangani pada tahun 1992 untuk membuka era rekonsiliasi dan kooperasi antar kedua Korea. Perdana Menteri Ki menegaskan bahwa kini waktunya telah tiba bagi kedua Korea secara bersama-sama untuk mengakhiri dan menghilangkan warisan perang dingin di semenanjung Korea. Korea Selatan akan berupaya terus untuk memperbaiki hubungannya dengan Korea Utara, dan akan terus bekerjasama dengan para sekutunya dalam mensukseskan *Sunshine Policy* sementara itu memperkuat pertahanan nasionalnya.<sup>136</sup>

Dalam pesan yang selalu disampaikan setiap awal tahun baru oleh presiden-presiden di tiap-tiap negara, kali ini Presiden Kim Dae-jung menjanjikan akan memperluas hubungan non-pemerintah (*Non-Governmental Diplomacy*),

---

<sup>135</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, op.cit., h. 29.

<sup>136</sup> *Ibid.*, h. 30.



diantaranya meneruskan upaya yang pernah dilakukan mantan Presiden Korea Selatan sebelumnya Roh Tae-woo, yaitu membantu keluarga Korea yang terpisah melalui segala cara. Korea Selatan berupaya mengadakan perundingan dengan pihak Korea Utara untuk bekerjasama dalam mewujudkan pertemuan keluarga yang terpisah, dan menjanjikan bantuan pupuk untuk Korea Utara dalam menanggulangi masalah pertaniannya.<sup>137</sup>

Keberhasilan *Sunshine Policy* Korea Selatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh perbaikan hubungan antara Amerika Serikat, Jepang dengan Korea Utara, yang dimana ketiga negara tersebut pada saat itu sedang melakukan perundingan dalam upaya menormalisasikan hubungan diplomatik. Dukungan Korea Selatan terhadap upaya-upaya normalisasi hubungan diplomatik ketiga negara tersebut adalah sesuai dengan kebijakan yang menganjurkan negara-negara sekutunya tersebut untuk dapat membuka kembali hubungan diplomatik dan dialog dengan Korea Utara.<sup>138</sup>

Dalam upaya untuk mewujudkan tercapainya perdamaian abadi dan stabilitas keamanan di semenanjung Korea, pada tahun 1999 telah dilakukan dialog empat negara (Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat dan Cina). Dialog ini merupakan dialog yang keenam kalinya, dan berhasil di Jenewa, walaupun pertemuan yang keenam kalinya tersebut belum membuahkan hasil yang berarti. Pada dialog tersebut, Korea Selatan mengusulkan kembali bahwa antara Korea Selatan dengan Korea Utara harus dapat membentuk perjanjian perdamaian yang baru, yang meliputi unsur non-agresi dan penyelesaian konflik permasalahan secara proses damai. Namun usulan tersebut justru bertolak belakang dengan Korea Utara yang masih menegaskan bahwa mereka akan tetap memasukkan dalam *rundown* acara dialog mengenai penarikan 37.000 pasukan Amerika Serikat dari Korea Selatan dan dialog yang harus ditandatangani oleh Korea Utara dan Amerika Serikat akan tetapi malah ditolak oleh Korea Selatan.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 6.

<sup>139</sup> *Ibid.*, h. 7.

Tentara Sekutu pimpinan Amerika Serikat yang menurut Korea Selatan telah menyelamatkan mereka dalam perang Korea tahun 1950-1953, dan ikut menjaga, memelihara keamanan dan berusaha menanamkan pengaruh paham liberal di semenanjung Korea hingga saat ini, telah membuat Korea Selatan memberikan prioritas utama dalam hubungan luar negerinya dengan Amerika Serikat. Hubungan persekutuan yang telah lama dijalin tersebut, dianggap Korea Selatan mempunyai arti penting, baik dalam bidang politik, ilmu pengetahuan dan keamanan (militer), maupun dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan dan memelihara hubungan tradisionalnya tersebut dengan Amerika Serikat. Presiden Kim Dae-jung pada tanggal 2 Juli 1999 melakukan kunjungan resmi kenegaraan yang kedua ke Amerika Serikat untuk meminta dukungan politik terhadap upaya-upayanya tersebut dalam mewujudkan tercapainya rezim perdamaian baru dan stabilitas di semenanjung Korea serta mewujudkan tercapainya rekonsiliasi dan hidup berdampingan secara damai diantara kedua Korea yang selama ini hidup dibawah konflik berkepanjangan.<sup>140</sup>

Dalam kunjungannya selama dua hari tersebut dan atas undangan presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Bill Clinton, dapat dihasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Kedua kepala negara sepakat untuk bekerjasama dalam mencegah Korea Utara untuk tidak melakukan uji coba peluncuran rudalnya kembali, serta memperingatkan Korea Utara jika tetap melakukan uji coba rudalnya, maka hal tersebut akan dapat mengancam perdamaian dan stabilitas yang bukan saja di semenanjung Korea tetapi juga di Asia Timur Laut yang juga akan berpengaruh pada kepentingan Korea Selatan dalam menjaga hubungan baiknya dengan Amerika Serikat dan Jepang.
2. Presiden Clinton menegaskan kembali komitmennya bahwa Amerika Serikat akan terus melindungi keamanan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara seperti yang telah diperlihatkan sewaktu terjadinya insiden saling tembak antara kapal patroli angkatan

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

Korea Selatan dengan Korea Utara di laut barat pada bulan Juli dimana Amerika Serikat telah mengirimkan armadanya ke laut Korea Selatan, dan terus mendukung sepenuhnya *Sunshine Policy* yang digunakan Korea Selatan terhadap Korea Utara.

3. Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat mempercepat upaya-upaya perbaikan jarak rudal Korea Selatan yang pengembangannya telah diawasi dibawah perjanjian Seoul-Washington. Dalam prinsipnya Washington menyetujui Seoul mengembangkan rudalnya dengan jarak sampai 300 km, meskipun kedua negara perlu lebih lanjut merundingkan hal tersebut secara transparan.
4. Presiden Kim Dae-jung menegaskan kembali komitmennya bahwa Korea Selatan dengan Amerika Serikat akan terus memelihara postur pertahanan gabungan yang kuat untuk menangkal provokasi Korea Utara, dan kedua pemimpin mempunyai pandangan yang sama bahwa kedua negara perlu untuk saling mendukung kebijakannya terhadap Korea Utara secara konsisten dan terus menerus.
5. Presiden Clinton menegaskan kembali komitennya bahwa Washington mendukung sepenuhnya *Sunshine Policy* yang digunakan Korea Selatan terhadap Korea Utara, dan memperkuat hubungan persekutuan keamanan bilateral yang bertujuan untuk menjamin perdamaian abadi dan stabilitas di semenanjung Korea.
6. Presiden Kim Dae-jung menegaskan bahwa Korea Selatan akan berupaya menyukseskan *Sunshine Policy*-nya atas dasar keamanan yang solid dan konsistensi.
7. Kedua belah pihak sependapat bahwa kedua negara harus menandatangani perjanjian investasi bilateral dan presiden Kim Dae-jung berjanji akan terus memperbaiki lingkungan usaha bagi investasi asing. Korea Selatan dengan Amerika Serikat juga menyambut baik perundingan perjanjian jaminan sosial bersama yang bertujuan untuk meringankan pengusaha dari pembayaran pajak jaminan sosial kedua negara.

8. Kedua presiden sepakat memperluas program *business visa referral*, dan presiden Kim Dae-jung berjanji akan terus mendorong reformasi dalam bidang finansial, korporasi, perburuhan dan sektor umum. Presiden Clinton memuji program reformasi restrukturisasi yang telah dilakukan Korea Selatan untuk mengatasi krisis, dan Washington mendukung program yang sedang berjalan tersebut. Kedua pihak juga sepakat melakukan upaya-upaya bersama untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan bidang-bidang lainnya.
9. Pada kesempatan kunjungannya ke Amerika Serikat tersebut, Presiden Kim Dae-jung menerima hadiah *The 1999 Philadelphia Liberty Medal* dari Walikota Philadelphia Edward G. Rendell atas prestasi memajukan demokrasi dan HAM di Korea Selatan. Presiden Kim Dae-jung dalam pidatonya berjanji akan terus mengembangkan pembangunan demokratisasi dan HAM di Korea Selatan, dan hadiah yang ia terima sebesar US\$ 100.000 akan disumbangkan kepada *Forum of Democratic Leaders in the Asia-Pacific Region (FDL-AP)* yang ia dirikan pada tahun 1994 bersama dengan pemimpin-pemimpin Asia Pasifik, termasuk mantan Presiden Filipina Corazon Aquino. Dipilihnya ia sebagai penerima medal diakhir abad ke-20 ini merupakan suatu kehormatan bagi Korea Selatan yang telah dapat mencapai kebebasan demokrasi dan menghargai Hak Asasi Manusia.<sup>141</sup>

Di ruang lingkup kebijakan politik dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara. Korea Selatan menunjukan kebijakannya pada peningkatan hubungan kerjasama luar negeri (yang cukup erat) dengan negara-negara di kawasan Asia timur laut, terutama dengan Jepang, yang tak lain juga merupakan sekutu dan negara yang pasca perang dunia II dikontrol oleh Amerika Serikat, baik secara militer maupun ekonomi. Begitupun dengan Cina dan Rusia, yang telah mereka normalisasi hubungan luar negerinya. Dalam hubungan luar negerinya dengan Jepang, Korea Selatan menganggap hal ini

---

<sup>141</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 31-33.

sebagai suatu hal penting, bukan hanya sama-sama sekutu dari Amerika Serikat, akan tetapi juga suatu hasil yang baik, mengingat kedua negara bila dilihat dari perspektif historis, merupakan negara (Korea Selatan) yang mempunyai hubungan kelim dengan Jepang di masa Perang Dunia II. Namun pasca kontrolisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Hubungan kedua negara dapat dikatakan telah membaik dan berjalan lancar. Hal tersebut ditandai dengan adanya kunjungan timbal-balik yang dilakukan pejabat tinggi antar kedua negara.<sup>142</sup> Hal terpenting yang dibahas adalah mengenai masa depan Korea Selatan dengan Korea Utara yang akan berdampak pada masalah keamanan di kawasan serta memperlancar hubungan kerjasama dengan tiga negara di kawasan Asia timur laut atas dasar pendekatan yang komprehensif terhadap Korea Utara. Selain itu, hal lain yang terpenting adalah dukungan terhadap upaya-upaya normalisasi hubungan luar negeri Jepang dengan Korea Utara yang diharapkan dapat menghilangkan kecurigaan Korea Utara terhadap Korea Selatan serta membantu membuka hubungan antara Korea dan menjamin perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea.<sup>143</sup>

Dalam mendukung hal tersebut, hubungan mereka dengan Rusia juga mulai dinormalisasi kembali. Kunjungan Presiden Kim Dae-jung ke Rusia pada tanggal 27 Mei 1999, merupakan momentum baik bagi kedua negara untuk memulai kembali hubungan yang lebih bersahabat lagi setelah kasus skandal spionase bulan Juni 1998, dimana kedua negara saling mengusir diplomatnya. Tampaknya Korea Selatan mulai memikirkan kembali pentingnya Rusia untuk ikut dalam upaya mewujudkan perdamaian di kawasan melalui dukungan terhadap tawaran Rusia untuk membentuk konferensi enam negara (Rusia, Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara).<sup>144</sup> Korea Selatan mengharapkan Moskow dapat memainkan peranan positifnya dalam membujuk Korea Utara untuk dapat bekerjasama dalam upaya mewujudkan rezim

---

<sup>142</sup> Kunjungan kerja PM Kim Jong-pil ke Jepang pada tanggal 1 September 1999 dan Penyelenggaraan pertemuan ke-II tingkat menteri antara Korea Selatan dengan Jepang pada tanggal 24 Oktober 1999, yang dihadiri oleh PM Jepang, Keizo Obuchi, *ibid.*, h. 8.

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Kelak nantinya tawaran tersebut direalisasikan dan dikenal dengan nama *Six Party Talks.* *Ibid.*, h. 9.

perdamaian baru di semenanjung Korea.<sup>145</sup> Sejalan dengan Korea Selatan, pihak Rusia juga ingin memperkuat hubungan dan kerjasama ekonominya dengan Korea Selatan dan Korea Utara dalam *Tripartite Cooperation*. Rencana kerjasama transportasi jalur kereta api Inter-Korea (yang merupakan implementasi dari KTT Inter-Korea) dengan *Trans-Siberia Railway (TSR)* dan pengiriman pasokan gas alam ke Korea Selatan melalui pipa yang melintasi Korea Utara juga menjadi perhatian kedua negara (Rusia dan Korea Selatan). Berbagai manfaat akan diraih jika jalur kereta api Inter-Korea dan TSR benar-benar terealisasi. Arus Transportasi dari Asia ke Eropa dan sebaliknya akan lebih efisien dan hemat, serta sekaligus membantu Korea Utara dalam meningkatkan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja. Presiden Kim Dae-jung sendiri memandang prospek jalur transportasi kereta api tersebut sebagai *iron silk road* yang akan menghubungkan wilayah Eropa, Asia Pasifik dimana Rusia dan Korea berada ditengah-tengahnya.<sup>146</sup>

Begitupula dengan hubungan antara Korea Selatan dan Cina yang semakin membaik. Presiden Kim Dae-jung dalam pertemuannya dengan Presiden Cina, Jiang Zemin pada kesempatan menghadiri pertemuan kepala-kepala negara APEC di Auckland, Selandia Baru tanggal 12 September 1999, memuji upaya-upaya yang telah dilakukan Cina untuk memajukan dialog antar Korea dan membujuk Korea Utara untuk tidak melakukan uji coba rudalnya. Kedua pemimpin tersebut juga menyepakati untuk terus membangun dan memperkuat hubungan persahabatan Seoul-Beijing. Presiden Kim Dae-jung menegaskan kembali posisi pemerintahnya bahwa Seoul tetap mendukung *One China Policy*. Presiden Jiang Zemin menyatakan bahwa Cina tetap mendukung upaya-upaya perdamaian yang sedang dilakukan Korea Selatan dan akan memainkan peranan yang konstruktif dalam memajukan hubungan antara kedua Korea. Pada awalnya, masalah dikembalikannya 7 pengungsi warga Korea Utara oleh pemerintah Cina ke Korea Utara dan masalah meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh warga Cina maupun Cina etnik Korea terhadap pengusaha dan wisatawan Korea Selatan di Cina, menyebabkan hubungan kedua negara agak terganggu. Korea Selatan

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 36.

sebelumnya sudah meminta Cina agar memperlakukan mereka secara manusiawi dan melindunginya, sebab Korea Selatan khawatir bila mereka (7 pengungsi) dikembalikan ke Korea Utara akan dihukum mati.<sup>147</sup> Namun dalam upayanya memperbaiki hubungannya dengan Cina yang disebabkan oleh kasus-kasus tersebut, pemerintah Korea Selatan pada tanggal 2 Februari 2000 mengirim utusan khusus Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Jang Jae-ryong ke Cina untuk membicarakan langkah-langkah perbaikan hubungan bilateral kedua negara yang sempat terganggu. Dalam pertemuan antara Jang dan rekannya Wan Yi telah disepakati pembentukan saluran dialog untuk menyelesaikan semua masalah yang tertunda dengan lancar di masa mendatang.<sup>148</sup>

Korea Selatan juga meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasamanya dengan negara-negara Uni Eropa, seperti Itali, Perancis, Jerman dan Vatikan. Presiden Kim Dae-jung disertai delegasinya mengadakan kunjungan kenegaraannya ke negara-negara tersebut pada bulan Maret 2000. Upayanya tersebut juga tak lain untuk mendapatkan dukungan terhadap *Sunshine Policy* yang mereka usung. Presiden Kim Dae-jung menggunakan momentum tersebut untuk mengeluarkan Deklarasi Berlin yang berisikan empat butir usulan perdamaian terhadap Korea Utara serta menyampaikan aspirasi Korea Selatan terhadap upaya bersatunya kembali kedua Korea kembali secara damai, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat di semenanjung Korea.<sup>149</sup>

Dari dalam negeri sendiri, Korea Selatan diawal tahun 2000 mempunyai sasaran utama reformasi pemerintah Korea Selatan dalam mewujudkan pemerintah yang kecil namun juga bersih dan efisien dengan pelayanan yang baik bagi rakyatnya. Selain itu, lima tugas pemerintah Korea Selatan yang merupakan faktor dalam negeri adalah mewujudkan masyarakat intelektual Korea yang

---

<sup>147</sup> Pada tanggal 14 Januari 2000, Presiden Kim Dae-jung telah mengganti Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hong Soon-young dengan Lee Joung-binn yang berusia cukup tua, 63 tahun. Penggantian tersebut sehubungan dengan adanya tuntutan dari partai oposisi GNP yang menilai kegagalan diplomasi Menludag Korea tersebut dalam menangani masalah pengungsi warga Korea Utara di Cina sehingga pengungsi warga Korea Utara tersebut dikembalikan ke Korea Utara oleh pihak Cina. Lihat KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 8-9.

<sup>148</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>149</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 41-46.

berbasis pada informasi dan ilmu pengetahuan, mewujudkan ekonomi Korea Selatan menuju peringkat standar dunia dan mengusahakan perdamaian dan kerjasama dengan Korea Utara, serta tetap menjaga dan memelihara hubungan tradisional mereka dengan Amerika Serikat dan Jepang. Selain hal-hal tersebut yang tercermin dalam garis kebijakan politik luar negeri pemerintah Korea Selatan dalam memasuki milenium baru diarahkan untuk memperkuat hubungan tradisionalnya dengan Amerika Serikat dan Jepang, meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama dengan Cina dan Rusia yang ditujukan untuk mencapai terwujudnya rezim perdamaian baru dan stabilitas di semenanjung Korea, memperkuat fondasi ekonomi dan kemampuan diplomatiknya serta ikut berpartisipasi dalam upaya-upaya internasional untuk mencegah pengembangan senjata pemusnah massal, memainkan peranan penting dalam mewujudkan terbentuknya dialog keamanan Asia Timur Laut sebagai *middle power country*, dan Korea Selatan juga berusaha merealisasikan stabilitas dan perdamaian di semenanjung Korea melalui pendekatan kepada Korea Utara sehingga memungkinkan terselenggaranya pertemuan puncak antara Korea Utara dengan Korea Selatan sebagai upaya untuk menghilangkan struktur perang dingin. Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa perdamaian di semenanjung Korea adalah prioritas utama bagi stabilitas di Asia Timur Laut, dan oleh karena itu, Korea Selatan bersama para sekutunya berupaya membantu Korea Utara untuk memahami bahwa pada kenyataannya perdamaian abadi dan stabilitas di semenanjung Korea hanya dapat dicapai bila kedua Korea mengadakan suatu dialog dan dapat mencapai suatu kesepakatan. Pemerintah Korea Selatan mempunyai prinsip bahwa masalah Inter-Korea hanya dapat diselesaikan oleh Korea Selatan dan Korea Utara, dan Korea Selatan menyatakan siap membuka dialog-dialog dengan Korea Utara setiap saat.<sup>150</sup>

Sekretaris Presiden Urusan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Korea Selatan Hwang Won-taek, dalam keterangan pers-nya tanggal 17 Februari 2000, mengatakan bahwa hubungan Korea Selatan-Korea Utara akan membaik dalam tahun ini atas dasar perkembangan terakhir yang terjadi di sekitar

---

<sup>150</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 28-29.



semenanjung Korea, dimana Amerika Serikat dan Jepang sedang berupaya menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara. Hwang mengindikasikan bahwa Korea Utara sungguh-sungguh berupaya untuk mengakhiri era keterisolirannya dari komunitas internasional. Hwang juga merasa optimis mengenai kemungkinan pertemuan puncak antara Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il. Diperkirakan dalam tahun ini program pertukaran-pertukaran antar kedua Korea akan tumbuh dengan cepat dan Korea Selatan juga telah mendesak Korea Utara untuk menyusun langkah-langkah guna memajukan pertemuan bagi anggota keluarga yang terpisah.<sup>151</sup>

Kembali ke faktor dalam negeri Korea Selatan, Presiden Kim Dae-jung melihat hasil pemilu 13 April 2000 di Korea Selatan sebagai hal yang perlu dilihat dan perlu dilakukannya dialog serta kerjasama antara partai yang berkuasa dengan partai oposisi guna menggalang rekonsiliasi dan persatuan dalam menghadapi berbagai isu nasional.<sup>152</sup> Presiden Kim Dae-jung menghimbau pihak oposisi dan masyarakat luas agar meninggalkan segala bentuk konflik dan mendukung pelaksanaan berbagai agenda nasional yang cukup dijalankan pemerintah, seperti diantaranya penyelenggaraan KTT Inter Korea di bulan Juni 2000 serta melanjutkan reformasi ekonomi. Untuk itu, dalam hal ini Presiden Kim Dae-jung mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pimpinan partai politik, mantan presiden, politisi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.<sup>153</sup>

Sebagai realisasi keinginannya untuk mengadakan pertemuan dengan para politisi dan pimpinan partai politik, Presiden Kim Dae-jung pada tanggal 24 April 2000 mengadakan pertemuan dengan pimpinan *Grand National Party* (GNP) Lee Hoi-chang. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengadakan tukar pikiran dan pandangan guna mendapatkan dukungan pihak oposisi terhadap langkah-langkah kebijakan pemerintah yang akan diambil oleh Presiden Kim Dae-jung. Dalam

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>152</sup> Kemenangan *Grand National Party* (GNP) sebagai partai oposisi dalam pemilu 13 April 2000 membuat pihak *Millenium Democratic Party* (MDP) pimpinan presiden Kim Dae-jung mengajak partai oposisi bergabung terutama dalam rencana mereka (MDP) menyelenggarakan KTT Inter-Korea 2000 sebagai isu utama. Lihat KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 3.

<sup>153</sup> *Ibid.*

pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyatakan kepuasannya yang ditandai dengan dikeluarkannya 11 butir kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut antara lain berisi dukungan oposisi terhadap kebijakan Presiden Kim Dae-jung terhadap Korea Utara, khususnya yang menyangkut dengan catatan Korea Selatan tidak akan melakukan kompromi mengenai hal-hal yang menyangkut keamanan nasional serta hubungan kedua Korea yang harus berdasarkan azas resiprositas. Dan mengenai kekhawatiran oposisi atas rencana *Millenium Democratic Party* (MDP) pimpinan Presiden Kim Dae-jung untuk melakukan koalisi bersama *United Liberal Democrats* (ULD) di parlemen, Presiden Kim Dae-jung berjanji tidak melakukan pembentukan koalisi yang bertujuan membangkitkan kekalahan dari partainya.<sup>154</sup>

Pada tanggal 28 April 2000 Presiden Kim Dae-jung mengadakan pertemuan dengan presiden partai oposisi minoritas ULD, Lee Han-dong di istana kepresidenan Chong Wa-dae. Pertemuan yang berlangsung cukup lama tersebut menghasilkan 8 (delapan) butir pernyataan bersama tanpa adanya kemungkinan kedua partai untuk kembali menjalin koalisi seperti yang pernah terbentuk pada bulan Februari 1998. Isi dari pernyataan bersama tersebut antara lain menegaskan pentingnya kedudukan ULD di dalam Majelis Nasional sebagai penyeimbang dan stabilisator, serta kesediaan kedua belah pihak untuk mengadakan pertemuan serupa jika terdapat hal-hal yang penting yang harus dibicarakan, khususnya yang menyangkut perkembangan dalam negeri dan kesejahteraan rakyat. Pemimpin ULD, Lee Han-dong juga menyambut baik KTT Inter-Korea bulan Juni 2000 sebagai batu loncatan menuju penyatuan kedua Korea. Seperti halnya dalam pertemuan dengan pemimpin GNP, baik Presiden Kim Dae-jung maupun pemimpin ULD Lee Han-dong sepakat bahwa dalam KTT nanti tidak akan ada langkah kompromi yang dapat mengorbankan kepentingan nasional Korea Selatan, melainkan segala sesuatunya harus berdasarkan azas resiprositas. Presiden Kim Dae-jung juga akan menunggu ratifikasi dari majelis nasional terlebih dahulu jika masalah keterlibatan pembayar pajak Korea Selatan dalam bantuan ekonomi untuk Korea Utara diperlukan suatu landasan hukum (undang-

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, h. 4.

undangnyanya). Sedangkan dalam pertemuannya dengan pimpinan *Democratic People's Party* (DPP) Kim Yoon-whan pada tanggal 1 Mei 2000, telah dikeluarkan lima butir kesepakatan bersama yang pada intinya berisikan dukungan terhadap langkah Presiden Kim Dae-jung bagi terlaksananya KTT Inter-Korea.<sup>155</sup>

Pada akhir tahun 2001, konfrontasi di dalam lingkaran politik dalam negeri Korea semakin meningkat. Kebijakan pemerintah Presiden Kim Dae-jung “*sunshine policy*” yang ditujukan kepada Korea Utara merupakan penyebab pertama munculnya krisis kepercayaan. Presiden Kim saat itu menghadapi tantangan keras dari Majelis Nasional dan masyarakat Korea terhadap usahanya untuk secara sepihak meneruskan *sunshine policy* yang diyakini cukup rasional untuk membina hubungan Inter-Korea. Pada kenyataannya kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara tidak dapat dipisahkan dari politik dalam negeri. Banyak elemen yang berpengaruh di dalam negeri Korea Selatan yang menolak pemberian bantuan kemanusiaan kepada rezim Korea Utara tanpa asas timbal balik, tanpa memperdulikan apakah *sunshine policy* telah berhasil mengakhiri konfrontasi Perang Dingin, apalagi selama ini Korea Selatan terlalu banyak mengalah terhadap tuntutan Korea Utara.<sup>156</sup>

### 3.3 Hasil dari penyelenggaraan KTT Inter-Korea

Tahun 2000 merupakan tahun bersejarah bagi hubungan kedua Korea, khususnya sejak bulan Juni 2000 yang dimana untuk pertama kalinya sejak Perang Korea (1950-1953), pemimpin kedua Korea dapat bertemu secara damai. Terealisasinya pertemuan antara kedua pemimpin Korea dalam sebuah KTT Inter-Korea antara Presiden Kim Dae-jung dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-il di Pyongyang, ibukota Korea Utara tanggal 13-15 Juni 2000 yang menurut Korea Selatan tidak terlepas dari upaya gigih Presiden Kim Dae-jung dalam menerapkan *Sunshine Policy* suatu *engagement policy* terhadap Korea

<sup>155</sup> *Ibid.*, h. 4-5.

<sup>156</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku I (Laporan Inti)*, Seoul: KBRI Seoul, 2001, h. 4.

Utara yang dicanangkan sejak ia terpilih menjadi presiden Korea Selatan pada bulan Februari 1998.<sup>157</sup>

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi tiga hari yang bersejarah tersebut, telah ditandatangani "Deklarasi Bersama" Korea Selatan dengan Korea Utara pada tanggal 15 Juni 2000 yang diharapkan dapat menjadi landasan utama bagi babak baru hubungan antar kedua Korea dengan melaksanakan kerjasama di berbagai bidang, meredakan ketegangan demi terciptanya perdamaian abadi di semenanjung Korea menuju rekonsiliasi nasional dan penyatuan kedua Korea pada akhirnya. Deklarasi Bersama tersebut juga untuk menjalankan kembali persetujuan-persetujuan kedua Korea yang telah ditandatangani sebelumnya yaitu *Joint Communique* 1974 dan *Basic Agreements* 1992, dan isi dari "Deklarasi Bersama" (South-North Joint Declaration) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reunifikasi Independen Korea
2. Pengakuan atas kesamaan formula reunifikasi kedua Korea
3. Pertukaran keluarga-keluarga terpisah (*family reunification*) dan resolusi atas tahanan Korea Utara
4. Meningkatkan keseimbangan pembangunan ekonomi nasional
5. Menyelenggarakan dialog tingkat pemerintah dan kunjungan pemimpin besar Korea Utara Kim Jong-il ke Seoul, Korea Selatan.<sup>158</sup>

Selain itu hasil dari penyelenggaraan KTT Inter-Korea 2000 juga dilaksanakannya pertemuan tingkat menteri (*South-North Ministerial Meeting*) kedua Korea yang disepakati untuk diselenggarakan dalam rangka melaksanakan secara efektif lima butir kesepakatan dalam Deklarasi Bersama Korea Utara dan Korea Selatan yang ditandatangani pada saat KTT Inter-Korea, 13-15 Juni 2000, dan hingga akhir tahun 2000, telah dilaksanakan empat kali pertemuan yang dilaksanakan secara bergantian di wilayah masing-masing.<sup>159</sup>

Pertemuan tingkat menteri I, 29-31 Juli 2000. Merupakan pertemuan tingkat menteri pertama yang diselenggarakan pasca KTT Inter-Korea. Pertemuan

<sup>157</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2000: Buku II (Bidang Operasional)*, op.cit., h. 25.

<sup>158</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>159</sup> *Ibid.*

ini diselenggarakan di Seoul, ibukota Korea Selatan selama tiga hari. Pertemuan tersebut telah menghasilkan terobosan baru dengan menyetujui enam butir kesepakatan penting, yaitu :

1. Melaksanakan pertemuan tingkat menteri antara Korea Utara dan Korea Selatan yang sejalan dengan semangat Deklarasi Bersama Korea Utara-Korea Selatan
2. Pengoperasian kembali kantor penghubung di Panmunjom, Korea Utara yang terhenti sejak November 1996.<sup>160</sup>
3. Mengadakan serangkaian perayaan peringatan Hari Pembebasan Nasional tanggal 15 Agustus 2000, yang masing-masing dilaksanakan di Korea Selatan, Korea Utara dan luar negeri dalam mendukung Deklarasi Bersama Korea Utara-Korea Selatan guna menghidupkan tekad nasional secara luas menjadi suatu kenyataan.
4. Bekerja sama dan mengambil langkah-langkah penting untuk menjamin para anggota *Chongryon* (Asosiasi masyarakat Korea yang bermukim di Jepang) untuk dapat berkunjung ke kampung halamannya.
5. Pemulihan kembali jalur kereta api Seoul-Shinuiju, dan bertekad untuk membahasnya dalam waktu dekat.
6. Mengadakan pertemuan tingkat menteri kedua pada tanggal 29-31 Agustus 2000 di Pyongyang, Korea Utara.<sup>161</sup>

Pada pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Unifikasi Korea Selatan ini, yaitu Park Jae-kyu dan Penasehat Senior Kabinet Korea Utara Jon Kum-jin juga telah dibahas dan disepakati bersama hal-hal khusus, seperti pelaksanaan pertemuan 100 orang anggota keluarga yang terpisah dari kedua belah pihak sebagai bagian dari perayaan Hari Pembebasan Nasional 15 Agustus ke-55. Kehadiran pejabat tinggi tingkat menteri Korea Utara dalam pertemuan tersebut

<sup>160</sup> Kedua Korea pada tahun 1992 membuka kantor penghubung di daerah perbatasan Panmunjom sebagai realisasi dari persetujuan dasar (*Inter-Korea Basic Agreement 1992*). Akan tetapi, pemerintah Korea Utara pada tahun 1996 secara sepihak menghentikan pengoperasian kantor penghubungnya. Sejak itu, satu-satunya sarana komunikasi antara kedua Korea akhirnya hanya melalui Palang Merah masing-masing pihak. *Ibid.*, h. 26-27.

<sup>161</sup> *Ibid.*

merupakan yang pertama kalinya sejak tahun 1992, dimana kedua Korea mengadakan pertemuan tingkat perdana menteri di Seoul yang menghasilkan persetujuan dasar kedua Korea 1992. Ketua Delegasi Korea Utara Jon Kum-jin beserta 6 anggota dan 2 wartawan juga diterima Presiden Kim Dae-jung di istana kepresidenan *Chong Wa-dae*. Presiden Kim Dae-jung menyambut baik hasil-hasil dari pertemuan tersebut.<sup>162</sup>

Pertemuan tingkat menteri II, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus hingga 1 September 2000 selama empat hari di Pyongyang, Korea Utara. Delegasi Korea Selatan yang berjumlah 35 orang dan kembali dipimpin oleh Menteri Urusan Unifikasi Park Jae-kyu. Dalam pertemuan kali ini, kedua delegasi menindak lanjuti hasil pertemuan pertama di Seoul, 29-31 Juli lalu dengan menghasilkan tujuh butir kesepakatan sebagai berikut :

1. Mengatur rencana pelaksanaan dua pertemuan keluarga yang terpisah berikutnya dalam tahun 2000
2. Mengadakan konsultasi dalam waktu dekat bagi pembicaraan antara pejabat militer kedua Korea. Masalah militer memang telah menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut. Pihak Korea Selatan mengusulkan agar kedua belah pihak membuka *hotline* militer dan menyelenggarakan pembicaraan antara pejabat militer kedua Korea. Korea Selatan dalam hal ini juga menuntut agar langkah-langkah detail mengenai pembentukan *Confidence Building Measures* (CBM) di bidang militer kedua belah pihak dapat lebih diperjelas dan diperinci dalam butir-butir kesepakatan ini. Namun, pihak Korea Utara memilih tetap untuk tidak beranjak lebih jauh dari posisinya yang hanya menegaskan berjanji akan membahasnya kemudian.
3. Pembentukan kerangka dasar hukum (*legal framework*) bagi kerjasama ekonomi dan bantuan pangan terhadap Korea Utara. Dalam hal ini, kedua Korea sepakat untuk membentuk sistem hukum dasar kerjasama tersebut seperti pembentukan *Investment Guarantee Agreement* (IGA) atau persetujuan perlindungan investasi dan persetujuan perlindungan

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, h. 28.

pajak berganda (P3B). Pihak Korea Selatan juga menyetujui kemungkinan pemberian pinjaman kepada Korea Utara yang dilanda krisis pangan akibat bencana alam yang berkelanjutan.

4. Mengadakan kontak tingkat badan pekerja yang membahas penghubungan kembali jalur kereta api dan pembangunan jalan yang akan menghubungkan antara kedua Korea.
5. Pengawasan terhadap bahaya banjir pada sungai Imjin dengan mendirikan pusat pengawasan banjir bersama.
6. Pertukaran kunjungan sekitar 100 orang wisatawan dari masing-masing pihak. Sekitar 100 orang wisatawan dari masing-masing pihak berkunjung ke pegunungan Halla di Korea Selatan dan pegunungan Paektu di Korea Utara, pada pertengahan September dan awal Oktober tahun 2000.
7. Menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri III pada tanggal 27-30 September di pegunungan Halla, pulau Cheju, Korea Selatan.<sup>163</sup>

Selama pertemuan lima hari di Korea Utara tersebut, Menteri Urusan Unifikasi, Park Jae-kyu juga berkesempatan mengadakan pertemuan dengan ketua komisi pertahanan nasional, yang tak lain pemimpin besar Korea Utara, yaitu Kim Jong-il yang antara lain bertukar pandangan mengenai upaya-upaya peredaan ketegangan dan pembangunan *Confidence Building Measure* (CBM) antara pejabat militer kedua Korea.<sup>164</sup>

Pertemuan tingkat menteri III, 27-30 September 2000 kembali dilaksanakan di Korea Selatan, yaitu di pulau Cheju. Pertemuan diawali dengan mengevaluasi implementasi isi "Deklarasi Bersama" setelah 100 hari ditandatangani. Kedua belah pihak kemudian menyepakati beberapa keputusan penting diantaranya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan keluarga yang terpisah dan pembentukan "Komite Bersama" untuk merealisasikan proyek-proyek kerjasama ekonomi diantara keduanya.<sup>165</sup>

<sup>163</sup> *Ibid.*, h. 29.

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*, h. 30.

Pertemuan tingkat menteri IV, 12-15 Desember 2000. Pertemuan tingkat menteri tahap empat kembali digelar pada tanggal 12-15 Desember 2000 di Pyongyang. Dalam pertemuan selama empat hari tersebut kedua Korea telah menandatangani sejumlah persetujuan yang dimaksudkan dapat menunjang hubungan ekonomi Inter-Korea, yang diantaranya adalah persetujuan penghindaran pajak berganda dan persetujuan perlindungan investasi (IGA). Kedua Korea juga menegaskan rencana pertemuan para anggota keluarga terpisah putaran ketiga pada akhir Februari 2001. Dalam konferensi pers bersama, dikemukakan mengenai kesepakatan mengenai rencana Korea Selatan untuk memasok sekitar 500.000 Kw listrik kepada Korea Utara. Selain itu, kedua belah pihak juga setuju untuk merealisasikan pembentukan komite kerjasama ekonomi Inter-Korea yang merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak pada saat pertemuan tingkat menteri tahap III di pulau Cheju, september lalu. Dalam komite tersebut, masing-masing pihak akan mengirimkan lima hingga tujuh orang delegasinya yang akan dipimpin oleh pejabat setingkat wakil menteri. Komite akan membahas berbagai masalah yang menyangkut pelaksanaan proyek kerjasama ekonomi Inter-Korea diantaranya termasuk penyambungan kembali jalur kereta api Seoul-Shinuiju dan penanggulangan banjir sungai Imjin, Korea Utara.<sup>166</sup>

Hasil lain dari penyelenggaraan KTT Inter-Korea yang tercantum dalam Deklarasi Bersama adalah pembicaraan tingkat Palang Merah dan pertemuan kembali keluarga yang terpisah (*Family Reunification / Reunions of Separated Families*). Menurut data pemerintah Korea Selatan, hingga tahun 2000 diperkirakan terdapat 7,67 juta warga Korea Selatan yang terpisah dari anggota keluarganya. Dari jumlah tersebut, 1,23 juta orang merupakan para anggota keluarga yang terpisah dari sanak saudaranya di Korea Utara. Sisanya merupakan keturunan yang lahir di Korea Selatan setelah berakhirnya Perang Korea. Sebagai realisasi dari isi "Deklarasi Bersama", kedua Korea Sepakat pelaksanaan

---

<sup>166</sup> *Ibid.*



pertemuan tersebut dibahas dalam pembicaraan tingkat Palang Merah masing-masing pihak.<sup>167</sup>

Pembicaraan palang merah Inter-Korea I, 27-30 Juni 2000. Dilaksanakan di pegunungan Kumgang, Korea Utara selama empat hari guna mempersiapkan pelaksanaan program pertemuan kembali keluarga terpisah (reunion of separated families) tahap pertama tanggal 15-18 Agustus 2000. 100 anggota keluarga dari masing-masing pihak disepakati untuk ikut serta dalam program pertemuan keluarga tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2000 bertepatan dengan hari Pembebasan Nasional Korea Ke-55 (dari pendudukan Jepang), pertemuan kembali anggota keluarga yang terpisah tahap pertama dapat dilaksanakan. Masing-masing pihak (Korea Utara dan Korea Selatan) mengirimkan 151 anggota rombongannya yang terdiri dari 100 orang anggota keluarga terpisah, 30 staf pembantu, 20 wartawan dan seorang pimpinan rombongan. Pada pertemuan bersejarah tersebut 102 warga Korea Selatan berkesempatan bertemu dengan 218 orang anggota keluarganya di Pyongyang dan 101 warga Korea Utara bertemu dengan sekitar 600 anggota keluarganya di Seoul. Seperti yang telah disepakati kedua belah, pertemuan antar-keluarga hanya dilakukan di tempat yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan untuk mengadakan pertemuan secara individual dengan mengunjungi rumah atau kampung halaman sanak saudaranya. Selain itu pertemuan kali ini juga hanya dilangsungkan di Seoul dan Pyongyang. Pada tanggal 12 Agustus 2000, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-il menyatakan bahwa pertemuan antara keluarga yang terpisah kedua Korea akan dilakukan kembali pada bulan September dan Oktober guna memenuhi keinginan dan harapan dari sekitar 7,67 Juta warga Korea Selatan yang mempunyai saudara di Korea Utara. Kim Jong-il juga berjanji akan memperbolehkan warga Korea Selatan untuk berkunjung ke kampung halamannya di Korea Utara.<sup>168</sup>

Pembicaraan palang merah tahap II, 20-23 September 2000. Pada pembicaraan yang berlangsung selama empat hari di pegunungan Kumgang, Korea Utara, kedua belah pihak sepakat untuk kembali melaksanakan pertemuan

---

<sup>167</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>168</sup> *Ibid.*, h. 31-32.

para anggota keluarga yang terpisah tahap kedua pada tanggal 2-4 November 2000 dan tanggal 5-7 Desember 2000 untuk pertemuan tahap ketiga. Dalam pembicaraan kali ini, kedua belah pihak sepakat untuk memperbolehkan 300 anggota keluarga yang terpisah untuk saling berkomunikasi melalui surat pada bulan November 2000. Kedua belah pihak juga telah menetapkan tanggal 13-15 Desember 2000 untuk melangsungkan pembicaraan tahap ketiga. Pelaksanaan pertemuan kembali anggota keluarga terpisah tahap kedua baru terealisasi pada tanggal 30 November - 2 Desember 2000 karena pihak Korea Utara melakukan penundaan secara sepihak. Pemerintah Korea Selatan memperkirakan penundaan tersebut erat kaitannya dengan keterbatasan tenaga dimana pada paruh kedua tahun 2000, Korea Utara banyak menyelenggarakan beberapa *event* besar di dalam negeri, seperti perayaan 55 tahun Partai Pekerja Korea Utara, perayaan 50 tahun keterlibatan Cina didalam membantu Korea Utara pada masa perang Korea, dan juga menerima beberapa kunjungan tamu asing termasuk Menlu Amerika Serikat pada masa itu, Madeleine Albright. Walaupun tertunda, pertemuan antar keluarga terpisah tetap dilaksanakan dengan penuh rasa haru oleh para sanak saudara dari kedua Korea yang telah lebih dari 50 tahun terpisah. Seperti halnya pertemuan pertama bulan Agustus lalu, kali ini 100 warga Korea Selatan diterbangkan ke Korea Utara dan juga sebaliknya 100 orang warga Korea Utara diterbangkan ke Korea Selatan untuk bertemu sanak saudaranya.<sup>169</sup>

Namun pertemuan keluarga terpisah tahap kedua agak berbeda dengan sebelumnya. Pemerintah Korea Selatan telah merampingkan seluruh proses untuk pertemuan tersebut termasuk juga dalam hal pendanaan. Menurut perkiraan, dana yang dikeluarkan Korea Selatan dalam *event* mencapai 1,9 milyar won. Pemerintah (Korea Selatan) merasa perlu merampingkan pengeluaran dana yang dianggap tidak begitu penting tujuannya demi mewujudkan peningkatan frekuensi pertemuan antar keluarga tersebut. Oleh karenanya dalam pertemuan tahap kedua ini, pemerintah juga tidak menempatkan para anggota keluarga dari Korea Utara di Hotel yang mewah seperti halnya pada pertemuan terdahulu, melainkan akan diberikan akomodasi di Hotel yang kelasnya lebih rendah. Pemerintah Korea

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, h. 32-33.

Selatan juga tidak mensubsidi para warganya yang bertemu keluarganya di Korea Utara, kecuali kepada mereka yang benar-benar tidak mampu.<sup>170</sup>

Penundaan pembicaraan palang merah dilakukan untuk pelaksanaan pertemuan kembali keluarga yang terpisah tahap III. Pembicaraan tahap III yang sedianya dilangsungkan pada tanggal 13-15 Desember 2000 ternyata tidak dapat terealisasi. Kedua Korea pada tanggal 10 Desember 2000 akhirnya memutuskan untuk menunda pembicaraan yang akan membahas pelaksanaan pertemuan kembali keluarga terpisah tahap III tersebut. Pada tanggal 9 Desember 2000, pihak Korea Selatan telah melayangkan surat kepada pihak Korea Utara mengingatkan tanggal pelaksanaan pembicaraan antara palang merah kedua Korea. Namun pihak Korea Utara membalas surat tersebut dengan mengusulkan agar pembicaraan tahap ketiga ditunda hingga tahun 2001. Menanggapi usulan pihak Korea Utara tersebut, Pihak Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk menerima usulan Korea Utara tersebut. Menurut kementerian Unifikasi Korea Selatan, tidak terdapat alasan bagi Korea Selatan untuk melangsungkan secara tergesa-gesa pembicaraan tahap ketiga tersebut. Namun demikian, pihak Korea Selatan akhirnya menyinggung masalah penundaaan ini dalam pertemuan tingkat menteri tahap IV di Pyongyang, 12-15 Desember 2000. Dalam pertemuan tingkat menteri ini, kedua Korea akhirnya menyepakati pelaksanaan pembicaraan tahap III dan pertemuan kembali keluarga terpisah tahap III, yang akhirnya dilaksanakan pada bulan Februari 2001.<sup>171</sup>

Program pertemuan kembali para anggota keluarga terpisah tahap III berhasil dilaksanakan pada tanggal 27 Februari-1 Maret 2001. Seperti halnya pertemuan sebelumnya, dalam pertemuan tersebut 100 anggota delegasi Korea Selatan berkesempatan mengunjungi saudaranya di ibukota Korea Utara, Pyongyang dan begitu pula sebaliknya, 100 anggota delegasi Korea Utara dapat bertemu dengan anggota keluarganya di ibukota Korea Selatan, Seoul. Dalam pertemuan kali ini, seorang anggota delegasi Korea Utara, Son Sa-jong yang berusia 90 tahun harus mendapat perawatan di rumah sakit di Seoul karena

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>171</sup> *Ibid.*, h. 34.

kondisinya lemah. Pihak Korea Selatan mengusulkan untuk merawat Son hingga kondisinya benar-benar pulih dan akan mengembalikannya ke Korea Utara melalui Panmunjom. Namun pihak Korea Utara menolak usulan tersebut dan berjanji akan merawat Son dengan baik. Isu pengembalian POW dan tahanan lainnya yang masih berada di Korea Utara juga sempat mewarnai jalannya pertemuan. Diantara 100 anggota delegasi Korea Utara terdapat dua orang POW dan seorang mantan *crew* maskapai penerbangan Korea Selatan, *Korean Air*. Selama ini pemerintah Korea Utara selalu menyangkal adanya POW ataupun tahanan lainnya di Korea Utara. Menurut Korea Utara, baik POW maupun tahanan lainnya telah memutuskan untuk menetap dan hidup di Korea Utara.<sup>172</sup>

Berdasarkan data resmi Pemerintah Korea Selatan yang tertuang dalam buku putih kementerian Unifikasi, masih banyak tahanan perang (POW) yang merupakan warga negara Korea Selatan terdapat di Korea Utara. Jumlah tersebut akan tertera pada grafik dibawah ini.

**Grafik 3.3.1**  
**Data Tahanan Perang (POW) Korea Selatan yang Terdapat di Korea Utara<sup>173</sup>**



Dalam bidang pertahanan, kedua Korea juga melakukan pertemuan dan merealisasikan implementasi dari "Deklarasi Bersama". Sejak penyelenggaraan KTT Inter-Korea bulan Juni di Pyongyang, ibukota Korea Utara. Hubungan dan

<sup>172</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 27-28.

<sup>173</sup> *Ibid.*, h. 31.

kerjasama bilateral kedua Korea diberbagai bidang memang terlihat jelas peningkatannya. Namun kemajuan tersebut ternyata belum menyentuh bidang pertahanan (militer) yang tidak kalah pentingnya dalam meredakan ketegangan militer di semenanjung Korea. Selain itu, implementasi "Deklarasi Bersama" seharusnya dibarengi oleh jaminan perdamaian dari otoritas militer kedua Korea. Atas dasar tersebut, pemerintah Korea Selatan menyerukan untuk diadakannya pertemuan atau pembicaraan tingkat militer dengan Korea Utara. Hasilnya pada saat pertemuan tingkat menteri II di Pyongyang, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat pejabat militer kedua Korea walaupun belum menentukan kepastian tanggalnya. Pada tanggal 13 September 2000, Menteri Angkatan Bersenjata Korea Utara, Kim Il-chol mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Korea Selatan Cho Seong-tae mengenai keseriusan Korea Utara terhadap usulan pertemuan Menteri Pertahanan Inter-Korea. Surat menteri Kim Il-chol sebagai jawaban atas usulan Korea Selatan pada tanggal 11 September 2000 yang disampaikan kepada Jenderal Pak Jae-gyong yang berkunjung ke Seoul dalam rangka menyampaikan hadiah dari Presiden Kim Jong-il kepada Presiden Kim Dae-jung. Pihak Korea Selatan dalam membalas surat Menteri Kim Il-chol menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan agar pertemuan Menteri Pertahanan Inter-Korea pertama hendaknya membahas berbagai isu yang berkaitan dengan peranan militer dalam proyek penyambungan kembali jalur kereta api Korea Utara dengan Korea Selatan yang menghubungkan Seoul-Shineuji. Agenda lain yang diusulkan Korea Selatan antara lain, pengenalan *Military Confidence Building Measures* termasuk didalamnya pembentukan *Military Hotline* dan beberapa hal lain yang menjadi perhatian bersama dalam rangka meredakan ketegangan militer kedua negara.<sup>174</sup>

Setelah melewati beberapa proses untuk menetapkan kepastian tanggal, pertemuan Menteri Pertahanan Inter-Korea yang pertama akhirnya dilangsungkan di pulau Cheju, Korea Selatan, 25-26 September 2000. Lima anggota delegasi Korea Selatan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Cho Seong-tae dan lima anggota delegasi Korea Utara dipimpin oleh Menteri Angkatan Bersenjata Korea Utara

---

<sup>174</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2000: Buku II (Bidang Operasional)*, op.cit., h. 34-35.

Kim Il-cho. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak menyepakati lima butir persetujuan bersama yang antara lain berintikan kesepakatan untuk mengadakan *Working-level Meeting* pada bulan Oktober 2000, menyelenggarakan pertemuan Menteri pertahanan kedua pada pertengahan November 2000, memperbolehkan kendaraan, personil dan perlengkapan lainnya untuk memasuki masing-masing wilayah melalui DMZ dan menjamin keselamatan dalam mendukung pembangunan penyambungan kembali jalur kereta api dan jalan raya yang menghubungkan kedua Korea, serta akan mengambil langkah bersama dalam pelaksanaan "Deklarasi Bersama".<sup>175</sup>

Pembukaan kembali jalur kereta api kedua Korea akhirnya dapat dilaksanakan pada tanggal 18 September 2000, yang menghubungkan antara kota Seoul dengan Kota Shinuiji secara resmi. Hal tersebut ditandai dengan pembongkaran dinding pemisah yang selama ini memutuskan jalur kereta api kedua Korea. Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung yang hadir untuk meresmikan acara tersebut di Imjingak, sebuah desa di dekat DMZ, menegaskan bahwa pembongkaran dinding pemisah yang selama ini merupakan simbol Perang Dingin dan pembagian kedua Korea telah hilang dan diganti dengan semangat untuk melakukan proses rekonsiliasi. Dengan diresmikannya penyambungan kembali jalur kereta api tersebut, kedua Korea dalam melakukan langkah awal akan membersihkan daerah tersebut dari ranjau-ranjau darat. Diharapkan pembersihan ranjau akan selesai pada akhir bulan November 2000. Rencananya Korea Selatan akan memperbaiki dan mengadakan penyambungan kembali jalur kereta api sepanjang 12 km antara kota Musan dengan Changdan. Diharapkan pekerjaan penyambungan kembali 12 km jalur kereta api yang menelan biaya 54,7 milyar won tersebut akan selesai sebelum bulan September tahun 2001. Sedangkan 12 km sisanya antara kota Changdan dan Kaesong akan dilakukan oleh pihak Korea Utara. Pada bulan September tahun 2001, kedua Korea juga akan memulai pembangunan jalan bebas hambatan (tol) yang akan menghubungkan kedua Korea. Terlepas dari pandangan bahwa pembangunan jalur kereta api dan jalan raya antara kedua Korea merupakan langkah maju

---

<sup>175</sup> *Ibid.*, h. 35.

menuju terwujudnya rekonsiliasi kedua Korea, pihak partai oposisi dari dalam negeri Korea Selatan, yaitu *Grand National Party* (GNP) justru mengkhawatirkan pembangunan sarana transportasi darat tersebut yang dikatakan pihak GNP hanya akan mengundang ancaman keamanan bagi Korea Selatan. Pihak GNP mendesak pemerintah untuk menunda penghubungan kembali jalur kereta api antara kedua Korea, hingga Korea Utara dan Korea Selatan menyepakati pembentukan Komisi Militer Bersama, seperti yang dituangkan dalam *Basic Agreement* tahun 1992.<sup>176</sup>

Merealisasikan kesepakatan yang telah dicapai pada pertemuan tingkat menteri tahap IV, kedua Korea sepakat untuk mengadakan pertemuan Komite Kerjasama Ekonomi Inter-Korea yang pertama pada tanggal 26 Desember 2000 di Pyongyang guna membicarakan *supply* tenaga listrik ke Korea Utara dan pembangunan kawasan industri Grup *Hyundai* di kota Kaesong, Korea Utara. Terlepas dari kemajuan yang dicapai kedua belah pihak dengan disepakatinya beberapa persetujuan dalam pertemuan di Pyongyang tersebut, pihak oposisi di dalam negeri Korea Selatan justru kembali mengkhawatirkan sikap Korea Selatan yang terlalu lemah dengan selalu menuruti segala permintaan Korea Utara. Menurut juru bicara partai oposisi GNP Kwon Chul-hyeon, pihak Korea Selatan selama ini telah memberikan banyak bantuan terhadap pihak Korea Utara, yang di antara lain berupa bantuan pupuk, beras, televisi, dan juga bantuan berupa uang kepada pihak Korea Utara. Namun sebagai timbal baliknya pihak Korea Selatan, dikatakannya tidak mendapatkan apa-apa. Kwon (GNP) lebih lanjut mengingatkan bahwa untuk memasok tenaga listrik sebesar 500.000 Kw berarti *Korea Electric Power Corporation* (KEPCO) harus mengeluarkan biaya sebesar 700 milyar Won atau sekitar US\$ 636.000.000. Dalam perekonomian Korea Selatan yang dianggapnya masih belum stabil. Pemberian pasokan listrik terhadap Korea Utara yang memakan biaya begitu besar akan semakin melemahkan kondisi perekonomian Korea Selatan. Para Pejabat GNP lainnya juga memandang bahwa tuntutan Korea Utara akan permintaan pasokan listrik dari Korea Selatan hendaknya tidak dipenuhi, dan jika pemerintah Korea Selatan terus memenuhi segala permintaan Korea Utara segala permintaan Korea Utara, maka

---

<sup>176</sup> *Ibid.*, h. 36.

dikhawatirkan kelangsungan pemberian bantuan kepada Korea Utara akan mendapat tekanan dan perlawanan dari masyarakat. Lebih lanjut GNP menegaskan kembali agar pemberian bantuan terhadap Korea Utara tetap dilakukan atas azas resiprositas, dalam hal ini menuntut pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan masalah *Prisoners of War* (POW) Korea Selatan dan tahanan lainnya yang masih berada di Korea Utara.<sup>177</sup>

Salah satu hasil dari KTT Inter-Korea yang tertuang dalam "Deklarasi Bersama" bulan Juni 2000 dan disepakati untuk dijalankan namun belum dijalankan hingga tahun 2001 adalah kunjungan balasan pemimpin Korea Utara, presiden Kim Jong-il ke Seoul sekaligus melaksanakan KTT Inter-Korea kedua pada tahun 2001. Pemerintah Korea Selatan sangat berharap kunjungan Kim Jong-il dapat terlaksana di tahun 2001. Namun kunjungan tersebut masih belum dapat terealisasi. Pihak Korea Utara sendiri berungku kali menyatakan bahwa kunjungan tersebut akan terlaksana, namun tidak pernah memberikan ketegasan kapan kunjungan tersebut akan terealisasi. Menurut duta besar Belgia untuk Korea Utara, Koenraad Rouvroy (yang juga merupakan duta besar Belgia untuk Korea Selatan), pada saat ia bertemu menteri luar negeri Korea Utara saat itu, Paek Nam-sun di bulan Juli 2001, ditegaskan bahwa Presiden Kim Jong-il akan menepati janji melakukan kunjungan balasan ke Seoul. Namun, Dubes Rouvroy menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Paek Nam-sun tidak menyebutkan kapan kunjungan tersebut akan dilaksanakan. Perdana menteri Swedia saat itu, Goran Persson sebelumnya juga mengutarakan hal yang sama bahwa pada saat ia berkunjung ke Pyongyang di pertengahan Mei 2001, Presiden Kim Jong-il menyampaikan keinginannya untuk mengadakan kunjungan balasan ke ibukota Korea Selatan, Seoul. Namun kunjungan tersebut akan dikaitkan dengan bentuk kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap Korea Utara.<sup>178</sup>

Bagi Korea Utara sendiri, hasil dari KTT Inter-Korea membawa dampak positif bagi perkembangan dalam negerinya, khususnya dalam bidang ekonomi yang sebelum pertemuan tingkat tinggi tersebut mengalami penurunan yang

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, h. 36-37.

<sup>178</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 28-29.



sangat signifikan diakibatkan krisis, bencana alam dan kelaparan. Oleh karena itu, pemerintah Korea Utara berupaya memulihkan perkenomian. Dengan meingkatkan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, memperkuat undang-undang dibidang ekonomi, restrukturisasi perusahaan dan pabrik, menjernihkan dan memperjelas distribusi tanah dalam suatu tingkat nasional serta membangun pembangkit listrik skala kecil dan menengah. Presiden Kim Jong-il bertekad menghentikan krisis ekonomi yang melanda Korea Utara. Upaya-upaya tingkat nasional ini didukung oleh masyarakat internasional dan *joint economic ventures* dengan Korea Selatan. Dukungan ini diberikan untuk membantu Korea Utara menaikkan dan mengangkat nilai rendah ekonominya turun drastis pada tahun 1999. Kendala yang dihadapi oleh Korea Utara adalah sumber-sumber yang terbatas, fasilitas sosial yang kuno dan masalah-masalah lain yang menyedihkan, sehingga telah meminta kelanjutan dukungan luar untuk pertumbuhan ekonominya.<sup>179</sup>

Dengan dorongan perkembangan pandangan nasionalnya dalam masyarakat global sejak pertemuan puncak Korea Selatan, pemerintah Korea Utara berlomba menuju terjaminnya dukungan ekonomi dan secara aktif memperluas diri untuk menarik investasi luar dengan meyatukan industri dasar dan industri ringan dengan bentuk lain-lain yang di improvisasi. Meski demikian, karena kebijakan terbuka dan reformasi ekonomi pasar diperlukan untuk perkembangan yang normal dari ekonomi Korea Utara, tanpa perubahan-perubahan besar pada tingkat fundamental, harapan untuk pemulihan kembali ekonomi Korea Utara dapat dianggap sulit. Sebagai tambahan, faktor-faktor penyebab meluasnya kekhawatiran akan mengikuti roda depresi ekonomi dan akan tetap tinggal selama waktu itu. Guna memperketat genggam dan cengkraman terhadap rakyat dalam mengatasi dan menanggulangi harapan yang tidak realistis rakyat terhadap usaha reunifikasi dan adanya khayalan sekitar kapitalisme menyusulnya pertemuan puncak Korea Utara dengan Korea Selatan. Pemerintah Korea Utara melakukan suatu kampanye propaganda nasional untuk membesarkan peranan Kim Jong-il dalam proses reunifikasi dan

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, h. 137.

kepemimpinannya sebagai Ketua *National Defense Committee*. Pemerintah Korea Utara telah menekankan rakyat dengan suatu indoktrinasi ideologi yang lebih mendalam daripada sebelumnya dan mencari upaya untuk meredakan dan mengurangi guncangan intern mereka.<sup>180</sup>

Walaupun sebenarnya dalam kaitan dengan "Deklarasi Bersama" antara Korea Utara dengan Korea Selatan, pada tahun 2001 dapat diamati bahwa implementasinya belum menunjukkan perkembangan. Meskipun pada dasarnya kedua belah pihak menginginkan agar implementasi deklarasi tersebut dapat berjalan sesuai kesepakatan, namun terdapat beberapa faktor yang menghambatnya, antara lain adalah tekanan kelompok oposisi di Korea Selatan yang menginginkan pendekatan yang diambil pemerintah Korea Selatan terhadap Korea Utara lebih mengedepankan prinsip timbal-balik dan saling menguntungkan. Faktor lainnya adalah tuntutan Korea Utara agar 37.000 pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan segera ditarik, sebagai syarat terciptanya perdamaian di semenanjung Korea. Di samping faktor-faktor tersebut diatas, terdapat pula variabel penting yang sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi "Deklarasi Bersama" Korea Utara dengan Korea Selatan tersebut, yakni kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara yang berubah sejak pemetintahan Presiden Bush pada bulan Januari 2001. Faktor-faktor tersebut yang pada gilirannya menjadi latar belakang gagalnya pertemuan tingkat menteri ke-VI di Geumgangsang, Korea Utara pada tanggal 9-12 November 2001, pelaksanaannya sendiri bahkan sempat tertunda beberapa kali dari jadwal semula yang direncanakan pada tanggal 28-31 Oktober 2001.<sup>181</sup>

### 3.4 Perkembangan Hubungan Kedua Korea Pasca KTT Inter-Korea

Dalam pidatonya menyongsong tahun 2001, Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung mengatakan bahwa pemerintah akan tetap mendorong kebijakan Inter-Korea sebagai usaha untuk mengurangi ketegangan antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan meningkatkan pertukaran hubungan bilateral, sebagai tanda abad perdamaian dan kesejahteraan di semenanjung Korea. Dengan memperkuat

<sup>180</sup> *Ibid.*, h. 137-138.

<sup>181</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2001: Jilid I (Inti)*, *op.cit.*, h. 4.

konsensus nasional dan kerjasama supra-partisan, pemerintah akan menjamin bahwa hubungan Korea Utara dan Korea Selatan akan mendapat dukungan masyarakat. Sementara itu postur keamanan nasional tetap dipertahankan sampai perdamaian benar-benar terbentuk di semenanjung Korea.<sup>182</sup>

Pertemuan bersejarah antara Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il pada tanggal 15 Juni 2000 yang menghasilkan Deklarasi Bersama Pyongyang, dalam tahun 2001 ini belum mampu membawa pendekatan yang berarti dalam hubungan Inter-Korea. Harapan kunjungan balasan dari Pemimpin Korea Utara yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2001 belum terpenuhi. Bahkan sampai pertengahan pertama tahun 2001 dialog Inter-Korea terhenti sama sekali dan baru dibuka kembali pada tanggal 15 September 2001 dimana berlangsung pertemuan tingkat menteri V di Seoul dan pertemuan tingkat menteri VI di gunung Kumgang, Korea Utara. Pada kenyataannya Presiden Korea Selatan, Kim menghadapi masalah dalam negeri maupun situasi internasional yang tidak mendukung, sehingga kebijakan *sunshine policy* tidak berjalan dengan efektif.<sup>183</sup>

Deklarasi Bersama di Pyongyang oleh Presiden Kim Dae-jung dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il merupakan langkah bersejarah bagi kedua Korea yang diharapkan mampu mengakhiri masa Perang Dingin yang telah berlangsung selama lima dekade di semenanjung Korea. Empat putaran pertemuan tingkat menteri dan satu putaran pembicaraan tingkat Menhan Inter-Korea telah diadakan tahun 2000 untuk menindaklanjuti kesepakatan dari hasil KTT Inter-Korea di Pyongyang. Program-program pertukaran kunjungan keluarga terpisah yang melibatkan 600 keluarga Korea Selatan dan Korea Utara telah dilaksanakan sebanyak tiga kali di ibukota Seoul dan Pyongyang. Namun sejak terhentinya dialog Inter-Korea yang dinyatakan secara sepihak oleh Pemerintah Korea Utara pada tanggal 13 Maret 2001, maka pertemuan tingkat menteri V pada tahun 2001 yang seharusnya dilakukan pada 15-18 September 2001 dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri VI pada 8-14 November 2001. Hasil dari

---

<sup>182</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2000: Buku II (Bidang Operasional)*, op.cit., h. 22, 25.

<sup>183</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku I (Laporan Inti)*, op.cit., h. 6-7.

pertemuan tingkat menteri V di Pyongyang dinilai cukup menggembirakan namun kembali terkendala dalam pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai. Sedangkan pertemuan tingkat menteri VI di gunung Kumgang dapat dikatakan gagal menghasilkan kesepakatan yang signifikan. Sikap pemerintah Korea Utara kembali tertutup dengan adanya langkah-langkah *security alert* Pemerintah Korea Selatan dalam “*Emergency Precaution Measures*” yang dianggap ditujukan kepada Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan dalam *security alert* ini mengadakan latihan-latihan militer yang lebih intensif dengan sasaran stabilitas dalam negeri Korea Selatan dan keamanan warga asing dari serangan terorisme. Dalam pertemuan tingkat menteri VI pihak delegasi Korea Utara menuntut *security alert* Korea Selatan dicabut dan menolak Seoul dijadikan tempat pertemuan-pertemuan Inter-Korea berikutnya karena dianggap tidak aman. Darurat militer Korea Selatan akhir Desember 2001 dinyatakan dicabut.<sup>184</sup>

Sementara itu, untuk mengamankan semenanjung Korea, Pemerintah Korea Selatan mengusulkan untuk menghidupkan kembali “Pembicaraan empat Pihak” untuk membicarakan perjanjian perdamaian baru menggantikan *Armistice Treaty* Semenanjung Korea yang ditandatangani pada tahun 1953. Pembicaraan empat pihak yang melibatkan Amerika Serikat, RRC dan kedua Korea terhenti sejak bulan Agustus tahun 1999. Pada saat itu kebuntuan terjadi karena Korea Utara menuntut perundingan perjanjian damai hanya dengan Amerika Serikat yang intinya penarikan 37.000 pasukan Amerika Serikat dari Korea Selatan. *Armistice Treaty* tahun 1953 ditandatangani oleh pasukan koalisi internasional PBB pimpinan Amerika Serikat, pihak Korea Utara dan pihak *Chinese Volunteers’ Army*<sup>185</sup>.

Sejak permulaan tahun 2001, hubungan tersebut mulai terlihat *stagnant*. Pada bulan Maret 2001, hubungan Inter-Korea praktis terhenti setelah pemerintah Korea Utara secara sepihak pada tanggal 13 Maret 2001 membatalkan pertemuan tingkat menteri Inter-Korea V. Pertemuan tingkat menteri merupakan forum Inter-Korea terpenting selain KTT. Sejak KTT bulan juni tahun 2000 lalu di

<sup>184</sup> *Ibid.*, h. 7-8.

<sup>185</sup> *Ibid.*, h. 10.

Pyongyang, kedua Korea telah melaksanakan empat kali pertemuan tingkat menteri yang menghasilkan berbagai realisasi terobosan penting dalam hubungan, dialog dan kerjasama Inter-Korea. Penundaan sepihak penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri V oleh Korea Utara pada bulan Maret 2001 memang bukan merupakan hal yang baru, hanya saja, penundaan tersebut sangat mengejutkan karena disampaikan pada hari pelaksanaan pertemuan. Keputusan sepihak Korea Utara tersebut juga membawa konsekuensi terhentinya segala bentuk dialog Inter-Korea. Hasil pertemuan antara Presiden Kim Dae-jung dan Presiden Amerika Serikat George W. Bush di Washington D.C yang dianggap tidak memberikan keuntungan terhadap Pyongyang merupakan alasan Korea Utara menghentikan sementara segala bentuk dialog Inter-Korea. Sebelum pertemuan antara Presiden Kim Dae-jung dan Presiden Bush berlangsung, pemerintah Korea Utara pada tanggal 7 Maret 2001 telah menyetujui usul Menteri Unifikasi Korea Selatan Park Jae-kyu, mengenai penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri V pada tanggal 13 Maret 2001 sebaliknya Presiden Kim Dae-jung dari Amerika Serikat. Pemerintah Korea Utara nampaknya justru berhasrat mendengar hasil-hasil pertemuan antara Presiden Kim Dae-jung dan Presiden George W. Bush yang diharapkan mengakomodir kepentingan Korea Utara. Namun pada kenyataannya, dalam pertemuan di Washington D.C, Presiden Bush yang menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap pelaksanaan *Sunshine Policy* sebagai bentuk *engagement policy* terhadap Korea Utara tetap bersikap skeptis terhadap Korea Utara, khususnya pada pemimpin Korea Utara Kim Jong-il. Pejabat pemerintah Amerika Serikat lainnya termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Collin Powell juga masih belum sepenuhnya mempercayai Korea Utara yang dianggapnya sebagai *rogue state*, khususnya dalam hal program pengembangan peluru kendali. Hal inilah yang nampaknya membuat Korea Utara memutuskan menunda segala bentuk dialog Inter-Korea sementara itu menunggu bentuk kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara yang dapat diterima oleh Pyongyang.<sup>186</sup>

---

<sup>186</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahun 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 22-23.

Walaupun tidak sampai mengganggu kedekatan hubungan dan kerjasama bilateral kedua negara, perubahan pandangan pemerintah Amerika Serikat terhadap Korea Utara menimbulkan *perception gap* antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. Presiden Kim Dae-jung dapat memahami sikap skeptis dan *concern* Amerika Serikat terhadap Korea Utara dan ingin melakukan segala upaya untuk membantu Korea Selatan menyelesaikan *pending issues* dengan Korea Utara. Namun keadaan seperti ini juga menyulitkan posisi Korea Selatan dalam melanjutkan pendekatan terhadap Korea Utara. Bagi Korea Selatan nampaknya tidak ada pilihan lain kecuali mengadakan langkah-langkah penyesuaian mengenai kelanjutan kebijakan pendekatan terhadap Korea Utara tanpa bertentangan dengan pandangan Amerika Serikat. Salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan sementara usulan atau keinginan penandatanganan *Peace Treaty* untuk menjamin perdamaian di semenanjung Korea dan menggantikan *Armistice Treaty 1953*. Sebagai gantinya, pemerintah Korea Selatan lebih mengaktifkan perjanjian non-agresi yang tertuang di dalam *South – North Basic Agreement 1992*.<sup>187</sup>

Upaya peredaan ketegangan di semenanjung Korea juga dilakukan pemerintah Amerika Serikat pada bulan Juni 2001. Pada saat itu pemerintah Amerika Serikat menyatakan siap membuka kembali dialog dengan pemerintah Korea Utara. Kesiapan Amerika Serikat yang didukung Korea Selatan tersebut sayangnya belum juga mempertemukan Amerika Serikat dan Korea Utara karena penolakan Korea Utara terhadap tiga prasyarat yang diajukan Amerika Serikat menyangkut masalah program nuklir, pengembangan rudal dan persenjataan konvensional Korea Utara. Pada saat kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell ke Seoul, pemerintah Amerika Serikat menyatakan kesiapannya untuk memulai dialog tanpa syarat dan kapan saja dengan Korea Utara. Pemerintah Amerika Serikat hanya tetap berpedoman pada pembahasan agenda secara komprehensif yang menyangkut revisi *Agreement Framework 1994*, upaya pembentukan *Military Confidence Building Measures (Military CBMs)* dan masalah kemanusiaan disamping masalah masalah persenjataan

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, h. 32-33.

nuklir, persenjataan konvensional serta pengembangan rudal yang tetap harus dibahas secara serius dalam dialog tersebut. Pemerintah Korea Utara tidak memberikan tanggapan apapun terhadap kesiapan Amerika Serikat tersebut.<sup>188</sup>

Namun disela-sela perkembangan tersebut, perubahan sikap Amerika Serikat dan konstelasi politik terjadi pasca serangan 11 September 2001 terhadap *World Trade Center* di New York dan *Pentagon* di Amerika Serikat. Hal tersebut semakin tidak menguntungkan bagi peredaan ketegangan Amerika Serikat dengan Korea Utara yang melahirkan implikasi langsung terhadap kelangsungan dialog Inter-Korea. Pada awal bulan Desember 2001, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menuntut pemerintah Korea Utara untuk mengizinkan para pengawas asing dalam memberikan keyakinan bahwa Korea Utara tidak memproduksi senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction*). Presiden Bush juga memperingatkan Korea Utara mengenai konsekuensi atas profilerasi Korea Utara. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat juga menunjukkan sikap kerasnya terhadap Korea Utara dengan menuduh Korea Utara telah mengembangkan *Germ Warfare Weapons*. Sikap keras pemerintah Amerika Serikat dibalas dengan peringatan Korea Utara kepada Amerika Serikat agar menghentikan *Hostile Policy* terhadap Korea Utara atau pihaknya akan melakukan *Countermeasures* terhadap Amerika Serikat.<sup>189</sup>

Selama tahun 2001, sejumlah warga (pelarian) Korea Utara berupaya untuk bermigrasi ke Korea Selatan. Para warga Korea tersebut pada umumnya merupakan warga yang telah menetap dan bersembunyi selama beberapa tahun di Cina sebelum memutuskan untuk bermigrasi ke Korea Selatan melalui negara ketiga. Keputusan pemerintah Cina yang menolak memberikan mereka status pengungsi, namun memperbolehkan mereka ke negara selanjutnya, disambut baik oleh Korea Selatan. Namun, pemerintah Korea Utara menyampaikan ketidaksenangannya atas keputusan tersebut dan menuduh Seoul menggunakan isu tersebut untuk kepentingan politis semata. Pemerintah Korea Utara

---

<sup>188</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>189</sup> *Ibid.*

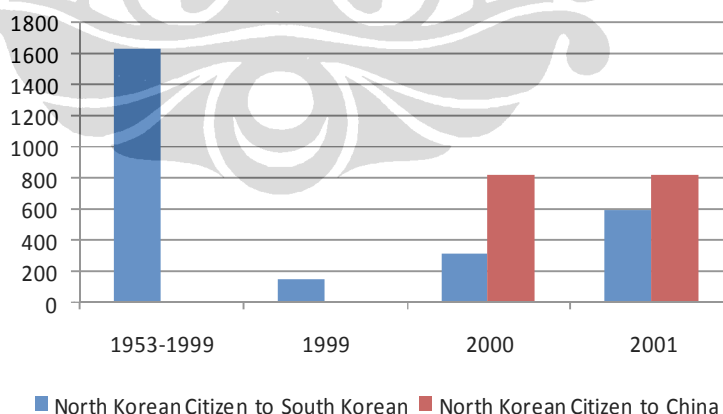
memperingatkan hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan rekonsiliasi Inter-Korea.<sup>190</sup>

Derasnya arus kedatangan warga pelarian Korea Utara di Seoul memaksa pemerintah Korea Selatan melakukan langkah-langkah lanjutan menyangkut kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan rekonsiliasi Inter-Korea. Pemerintah Korea Selatan berharap kasus-kasus tersebut tidak akan mempengaruhi rencana kedua Korea dalam mewujudkan langkah-langkah lanjutan menyangkut kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan rekonsiliasi Inter-Korea. Pemerintah Korea Selatan berharap kasus-kasus tersebut tidak akan mempengaruhi rencana kedua Korea dalam mewujudkan langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya sesuai isi 'Deklarasi Bersama' dan semangat KTT Inter-Korea tahun lalu.<sup>191</sup>

Berdasarkan data statistik pemerintah Korea Selatan, sejak berakhirnya Perang Korea (1950-1953) jumlah keseluruhan warga Korea Utara yang lari ke wilayah Korea Selatan sejumlah 1633 orang. Penjabaran akan dijelaskan pada grafik dibawah ini<sup>192</sup>

**Grafik 3.4.1**

**Statistik Penduduk Korea Utara yang Melakukan Pelarian Diri ke Wilayah Korea Selatan dan Cina**



<sup>190</sup> *Ibid.*, h. 29-30.

<sup>191</sup> *Ibid.*, h. 30.

<sup>192</sup> *Ibid.*, h. 31.



Dalam grafik diatas tertera dengan jelas bahwa telah banyak penduduk Korea Utara yang telah melakukan pelarian diri ke wilayah terdekat dari negaranya, seperti Korea Selatan dan Cina, karena berbatasan langsung dengan wilayah Korea Utara. Jumlah yang tertera di wilayah Cina, pada akhir tahun 2001 akan tiba dari Cina ke Korea Selatan, setelah pemerintah Cina mengizinkan mereka untuk pindah ke negara lain, setelah Cina menjadi wilayah perantara mereka untuk melarikan diri.<sup>193</sup>

Namun, walaupun hal tersebut membuat pemerintah Korea Selatan cukup antusias, pada kenyataannya hal tersebut membuat masalah baru bagi pemerintah Korea Selatan, mengingat kapasitas penampungan yang mereka miliki untuk tahun 2001 hanya cukup menampung sebanyak 130 orang.<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> *Ibid.*, h. 29-30.

<sup>194</sup> *Ibid.*, h. 31.